



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

DESTY NURAFIFAH. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Belanja Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor (*Implementation of Government Accounting Standards on Activity Expenditures at the Department of Investment and One-Stop Integrated Services, Bogor Regency*). Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menciptakan *good governance* dalam struktur pemerintahan. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota berupaya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta tanggung jawab dalam menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam membuat keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dibuat tidak hanya pada bidang ekonomi saja, tetapi di bidang sosial, hukum, dan politik. Dalam penyusunan dan penyiapannya laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, SKPD selaku bagian organisasi pemerintahan daerah diberikan anggaran untuk menjalankan kegiatannya. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan di SKPD, tidak terlepas dari adanya pengeluaran kas atau yang biasa disebut belanja. Belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan pengelolaan belanja dan proses pelaporan pertanggungjawaban belanja serta menerangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Belanja di DPMPTSP Kabupaten Bogor terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, sedangkan akuntansi belanja menggunakan UP, TU, GU, dan LS. Pencatatan belanja dilakukan menggunakan aplikasi SIMRAL. Belanja di DPMPTSP Kabupaten Bogor diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau pada saat diterbitkannya SP2D. Belanja barang dan jasa diukur pada saat pengeluaran kas kepada pihak ketiga dan belanja modal diukur berdasarkan nilai perolehan. Belanja di DPMPTSP Kabupaten Bogor dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Kata kunci: Belanja, DPMPTSP Kabupaten Bogor, Standar Akuntansi Pemerintahan